

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah juga berpotensi menimbulkan resiko fiskal.

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah yang memisahkan antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan yang cukup besar untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Undang - Undang tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Sarangih (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja sebaiknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan.

Pemberian otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan baru yang berdampak pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi sangat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan cara mengelola sumber daya dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Mudrajat, 2015).

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak kepada Pertumbuhan Ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat akan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan mendorong atau menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan Belanja Modal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2015) sampai saat ini masih banyak sekali masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang sangat tidak mendukung untuk dilakukannya investasi menimbulkan berbagai pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan kesenjangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan fiskal pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya memfokuskan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004).

Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

Fenomena saat ini bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal sangat kecil, sedangkan pada Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini menyebabkan tidak adanya peranan penting atas Pendapatan Asli Daerah

terhadap kegiatan daerah yang mana seharusnya PAD menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah, sehingga DAU menjadi sumber utama untuk membiayai kegiatan daerah tersebut (Syukriy, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2016) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal menyatakan hasil penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho(2016) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian lain juga telah dilakukan oleh Arwati (2015) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan DanaAlokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal, hasil penelitiannya menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Penelitian lain dilakukan oleh Sularno (2015) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal menunjukkan hasil penelitian bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ivana (2015) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Untuk penelitian selanjutnyayang dilakukan oleh Harianto (2016) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Brave *in*

Mexico Central Government (2015) states that economic growth has a significant positive effect on capital expenditure rejected. Jurnal Internasional yang dilakukan oleh Newbery in New Zealand Central Government (2015) dengan judul The Effect of Economic Growth, Regional Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditures, show the results of the study that Economic Growth and General Allocation Funds have effect on Capital Expenditures. While According to Maxwell in Iran Manicipalities (2015) that Economic Growth and General Allocation Funds dont have effect on Capital Expenditures.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2005-2018?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2005-2018?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2005-2018?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2005-2018?

1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2005-2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2005-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2005-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama- sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2005-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diterapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.
- b. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.
- c. Bagi penulis, sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta pengelolaan keuangan daerah, dan kaitannya dengan pembangunan daerah otonom sesuai dengan tujuan awal konsep desentralisasi.